

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025**

**L
A
K
I
P**

KATA PENGANTAR

Puji - syukur patut kita naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenananNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat aya Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2025 yang ditujukan kepada Bupati Sumba Barat Daya. Dalam LKIP yang disampaikan adalah pertanggungjawaban kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 untuk mewujudkan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 s/d 2025.

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama dan kerja cerdas dari semua staf. Namun perlu kami sampaikan bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih dijumpai banyak kendala, terutama untuk memenuhi standar LKIP yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKIP ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut di atas.

Sekian dan terima kasih.

Tambolaka, 05 Januari 2025

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumba Barat Daya,**



drh. Rihimeha A. Praing, MP
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 196805231998031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumba Barat Daya tentu memiliki visi, misi dan tujuan strategis. Untuk mewujudkannya, maka ditetapkanlah dua sasaran kinerja yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk mencapai kedua sasaran kinerja tersebut, pada tahun anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 program (tiga) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99 Sangat Berhasil. Kinerja ini dicapai dari 1 (Satu) program dan 1 (Satu) kegiatan yang dilaksanakan.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Aplikasi Publik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 84 % Berhasil. Kinerja ini dicapai dari 1 (Satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan.

Tambolaka, 05 Januari 2025

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumba Barat Daya,**



drh. Rihimeha A. Praing, MP
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 196805231998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP	1
C. PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 7
A. PERENCANAAN KINERJA	9
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025	10
C. RENCANA ANGGARAN	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 12
A. PROSES PENGUKURAN KINERJA	12
B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA	13
C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	13
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	14
 BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumba Barat Daya diberi ruang untuk melaksanakan program / kegiatan strategis. Untuk melaksanakan program / kegiatan tersebut, maka dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah tahun anggaran berjalan. Sarana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian wajib membuat LKIP tahun 2025.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan di sini sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
 - c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.
2. Manfaat
- Manfaat pembuatan LKIP yaitu:
- a. Mendorong instansi pemerintah, unit Bagian Organisasi, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
 - b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
 - c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
 - d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Struktur Organisasi

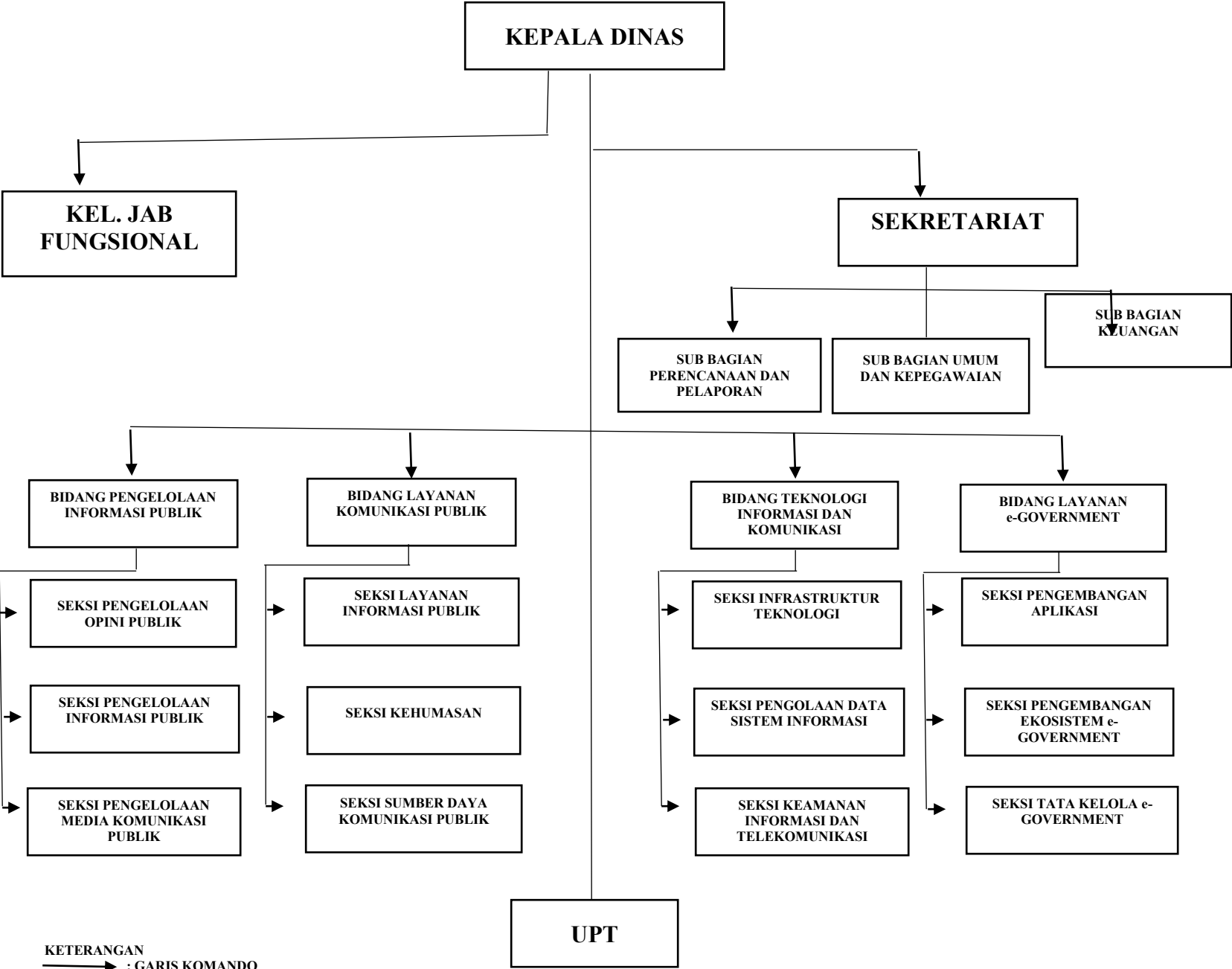
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan (Pelaksana Tugas)
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - c. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4. Bidang Layanan Komunikasi Publik
 - a. Seksi Layanan Informasi publik
 - b. Seksi Kehumasan
 - c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Seksi Infrastruktur Teknologi
 - b. Seksi Pengelolaan Data Integrasi Sistem Informasi
 - c. Seksi keamanan Informasi dan Telekomunikasi
6. Bidang Layanan e-Government
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

c. Seksi Tata Kelola e-Government

7. UPT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KETERANGAN
→ : GARIS KOMANDO
----- : : GARIS TANGGUNG
JAWAB →

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Bulan Desember 2025 dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut latar belakang pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister S2	1
2	Sarjana S1	20
3	Diploma 3	2
4	SLTA	4
5	SMP	1
6	SLTP	-
7	SD	-

b. Menurut golongan :

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan II	1
2	Golongan III	17
3	Golongan IV	5
4	PPPK	7

c. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan yang diikuti :

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	Pim II	1
2	Pim III	1
3	Pim IV	8

d. Menurut Jabatan Struktural :

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	11

3. Sarana dan Prasarana

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Bulan Desember 2025 dengan perincian sebagai berikut :

e. Menurut latar belakang pendidikan :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan		
	a. Roda Empat	1 unit	
	b. Roda Dua	3 unit	
2	Komputer		
	a. Komputer	14 Unit	
	b. Laptop	9 Unit	
	c. UPS	2 unit	
3	Perlengkapan Kantor		
	a. AC	3 unit	
	b. Kamera	4 unit	
	c. Printer	2 unit	
	d. Hardisk	6 unit	
	e. Infocus	3 unit	
	f. TV	1 unit	
	g. Antena TV	1 unit	
	h. Genset	1 unit	
	i. Warles	4 unit	
	j. Sound System Speaker	2 unit	
	k. Loud Speaker	4 unit	
	l. Kipas angina	5 unit	
	m. Modem	5 unit	
	n. Scanner	1 unit	
	o. Microphone/Wireles Mic	2 unit	
	p. Power Amplifer	1 unit	

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
4	q. Stand Microphone	1 unit	
	r. Mixer PVC	2 unit	
	s. Jack CBR	1 unit	
	t. Kabel Listrik	1 unit	
	u. Kabel USB (UTP)	2 unit	
	v. Tape Recorder	1 unit	
	w. Mic Meja	2 unit	
	x. Tripod	1 Unit	
	y. Drone		
	Meubelair		
	a. Meja Komputer	1 unit	
	b. Meja Biro Jati	2 unit	
	c. Meja Biro Lokal	4 unit	
	d. Meja Biro Setengah Biro	2 buah	
	e. Meja Kerja Jati	4 buah	
	f. Meja Kerja Lokal	2 buah	
	g. Meja Rapat Lokal Jati	2 buah	
	h. Kursi Putar/ Kursi standar Biro	3 buah	
	i. Kursi Kerja KDH	2 buah	
	j. Kursi Putar Standar ½ Biro	3 buah	
	k. Kursi Plastik Napoli	10 buah	
	l. Kursi Kerja Olympic	3 buah	
	m. Kursi kerja Malvir	1 buah	
	n. Kursi Kerja Lokal Jati	8 buah	
	o. Lemari Rak Kayu	6 buah	
	p. Sofa	1 buah	
	q. Gordyn	14 buah	
	r. Dinding Sekat.	12 buah	
	s. Webcam	2 buah	
	t. PC	1 buah	
	u. Keyboard	4 buah	
	v. mouse	4 buah	

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

1. Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Bagian Organisasi, dan Sistematisa Penyajian LKIP.

2. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 serta Rencana Anggaran Tahun 2018

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja. Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Rencana Strategis (RS) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, sebagai data dan informasi pendukung.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Pernyataan Visi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang Sejahtera berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi yang Efektif Dan Efisien Melalui Pembangunan Komunikasi Dan Informasi berkelanjutan Merakyat Dan Ramah Lingkungan”*.

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

- a Merumuskan, Mengkoordinasikan, Membina, Mengarahkan, Mengevaluasi dan Melaporkan kebijakan di Bidang Pengelolaan Opini dan aspirasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah Penyediaan konten lintas sektoral dan penyelolaan Media Komunikasi Publik;
- b Merumuskan, Mengkoordinasikan, Membina, Mengarahkan, Mengevaluasi dan Melaporkan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar data *center*, *Disaster recorvery center & TIK* di Pemerintah Kabupaten, Layanan penembangan Internet dan Penggunaan Akses internet, Layanan Manajemen Data dan Informasi e-Government, Intergrasi Layanan Publik dan pemerintahan, Layanan keamanan informasi e-Government, Layanan sistem Komunikasi intra pemerintah Kabupaten dan Layanan Statistik dan Persandian;
- c Merumuskan, Mengkoordinasikan, Membina, Mengarahkan, Mengevaluasi dan Melaporkan kebijakan di Bidang Layanan pengembangan dan pengelolaan *aplikasi generik, Spesifik dan suplemen yang terintegrasi*. Penyelenggaraan Ekosistem *TIK SMART CITY*, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan, *Gvernment Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK di Pemerintahan kabupaten dan Masyarakat Lingkup Kabupaten.

3. Penetapan Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 yaitu meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- b. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya. RKT tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja PK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2019 – 2025 tabel seperti dibawah ini

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 sebagai berikut :

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target (%)</i>	<i>Program / Kegiatan</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	82%	Program Pengelolaan Informasi Dan komunikasi Publik	1.180.699.030.00
			Kegiatan relasi media	887.626.140.00
			Kegiatan pengelola media komunikasi publik	153.620.000.00
			Kegiatan penyusunan konten	139.452.890.00
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.561.398.650.00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase Fasilitas Umum Indeks Kepuasan Masyarakat		Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	19.534.300.00
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah desa	19.534.300.00
			Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.541.864.350.00
			Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemda.	510.269.900
			Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	120.561.450.00
			Kegiatan penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	911.033.000.00

C. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar Rp. **4.832.588.656.00** terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Operasi	4.178.525.876.00
	Belanja Pegawai	1.920.704.512.00
	Belanja Barang dan Jasa	2.257.821.364.00
2	Belanja Modal	654.062.780.00
	Belanja Modal dan peralatan Mesin	654.062.780.00
J u m l a h		4.832.588.656.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2025 dengan perubahan Anggaran tahun 2025.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan , program dan sasaran melalui media berupa Formolir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formolir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “*Skala Pengukuran Ordinal*” sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja. sasaran adalah 99%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh satu sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran 85-100 %. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	94,20
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan komunikasi publik	94,20

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99 %. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 (satu) program dan 1 (kegiatan) kegiatan dengan 1 (Indikator) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	100	90,5	99%

Dari tabel di atas terlihat indikator sasaran *sangat berhasil* mencapai 99%. Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, di tahun pertama berjalannya Renstra ini *sasaran 1* telah menunjukkan awal yang baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Informasi Dan komunikasi Publik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 84%-100%. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 (satu) program dan 3 (kegiatan) kegiatan dengan 1 (Indikator) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik.	100	97	97
3	Pengelolaan media komunikasi publik	100	99	99
4	Relasi media		91	91

Dari tabel di atas terlihat ke-tiga indikator sasaran Sangat *berhasil* mencapai 85% - 99% Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, di tahun pertama berjalannya Renstra ini *sasaran 2* telah menunjukkan awal yang baik.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini.:

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.084.243.059.00	2.090.490.976.00	99
Kegiatan				
1	Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.963.710.912.00	1.973.150.912.00	99
2	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.907.299.512.00	1.920.704.512.00	99
3	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian /Verifikasi SKPD	56.411.400.00	52.446.400.00	92
4	Administrasi umum Perangkat Daerah	35.509.000.00	25.763.000.00	75
5	Kegiatan penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	3.225.000.00	3.225.000.00	99

6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32.284.000.00	22.538.000.00	69
7	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	56.738.373.00	55.243.864.00	94
8	Penyediaan Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	13.446.000.00	13.446.000.00	99
9	Penyediaan jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	10.675.950.00	4.460.200.00	17
10	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	32.616.423.00	37.337.664.00	31
11	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	28.284.774.00	36.333.200.00	65
12	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	28.284.774.00	36.333.200.00	65
Program 2	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	169.411.500.00	1.180.699.030.00	48
Kegiatan				
13	Kegiatan Penyelenggaraan hubungan masyarakat , media dan Kemitraan.	887.626.140	813.987.400	91
14	Kegiatan Pengelolaan media komunikasi publik	152.620.000	152.620.000.00	99
15	Kegiatan Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik.	139.425.890	139.452.890.00	99
Program 3	Program Pengelolalaan aplikasi informatika	1.902.166.750.00	1.561.398.650.00	67
Kegiatan				
16	Kegiatan pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domaian di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten / Kota.	21.799.000.00	19.534.300.00	84
17	Kegiatan pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa	21.799.000.00	19.534.300.00	84
18	Pengelolaan E-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.880.367.750.00	1.541.864.350.00	83
19	Kegiatan fasilitasi penyelenggaran SPBE di lingkungan pemda	951.019.000.00	510.269.900.00	28
20	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	18.315.750.00	120.561.450.00	43
21	Kegiatan Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	911.033.000.00	911.033.000.00	99

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran dari 4 program dan 21 kegiatan mencapai 85-100 % termasuk sangat baik.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mewujudkan 2 sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah dilaksanakan 3 program strategis dan 4 kegiatan dengan 4 indikator. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III tersebut diatas, maka dapat diambil simpul-simpul sebagai berikut:

1. Rata –rata pencapaian kinerja dari 2 sasaran adalah 90,20%. Mengacu pada Skala Pengukuran Ordinal, maka pencapaian kinerja tersebut dikategorikan ***Sangat Berhasil*** karena sesuai dengan standar 85%-100% atau lebih.
2. Sasaran-sasaran yang dikategorikan Sangat Berhasil dengan Pencapaian kinerja 85%-100% atau lebih adalah sebagai berikut:
 1. Tersedianya konten Media Komunikasi Publik.
 2. Tersedianya Media Komunikasi Publik
 3. Terkelolanya Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan Komunitas.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

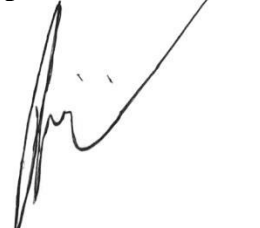
Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan atau kurang berhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran pada tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 05 Januari 2025

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumba Barat Daya,**



drh. Rihimeha A. Praing, MP
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 196805231998031005

L A M P I R A N

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Skor hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	30 %	Program Penyelenggaraan media komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten kota		INPUT Tersedianya informasi dan relasi media OUTPUT Terlaksananya Pelayanan informasi OUTCOME Meningkatnya Pengetahuan masyarakat mengenai informasi dalam daerah	Anggaran	Rp. 19.534.300.00	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase fasilitas Umum Indeks Kepuasan Masyarakat	50 %	Program Pengelolaan aplikasi informatika		INPUT Tersedianya fasilitas Internet dan Media Komunikasi Publik OUTPUT Terlaksananya Pelayanan internet dan Pengelolaan Media komunikasi publik OUTCOME Meningkatnya penggunaan layanan media komunikasi publik dan terselenggaranya hubungan masyarakat dan kemitraan komunitas	Anggaran	Rp. 1.561.398.650.00	
--	--	------	--	--	--	----------	----------------------	--

